



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111**

Sekretariat: Jln. Paloe Phang, Gedung Lama FKIP Lantai 1; Cj. 086277335241 an Edi Gusman



Nomor : 007/BEM_FKIP_/III/2013
Lamp : 1 eks
Hal : Mohon Menjadi Pemateri

yang terhormat,

Bapak Kamaruddin Hasan, M.Si

Di -

Tempat

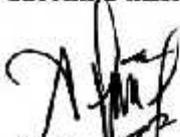
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Unsyiah selalu bekerja sama dengan civitas akademika Unsyiah dalam menjalankan program kerja. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan **Seminar Nasional: Prospek Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh untuk Kesejahteraan & Kemakmuran Rakyat Sesuai dengan Amanah UUD 1945 Dan UUPA**, yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 di Auditorium FKIP Unsyiah.

Maka kami memohon **Bapak Kamaruddin Hasan, M.Si** untuk dapat menjadi salah satu pemateri dalam seminar tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 27 Maret 2013
Panitia Pelaksana,
Sekretaris

Ketua Panitia


Al-Furqan
NIM 1006102040011




Kiri Isthaifa Najmi
NIM 0906102050037

Mengetahui,


Pembantu Dekan III
FKIP Unsyiah
Dr. Djuri, M.Si.
NIP 196311411989031001


Ketua BEM
FKIP Unsyiah
Edi Gusman
NIM 0806103050026

POTENSI MANUSIA DAN ALAM; AMANAH MENSEJAHTERAKAN DAN MEMAKMURKAN RAKYAT ¹

Oleh:
Kamaruddin Hasan ²

LATAR BELAKANG



Tulisan ini, tidak bermaksud mengulas secara tuntas dan utuh berkaitan dengan potensi Manusia dan Alam Aceh untuk kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat. Saya hanya mampu menguraikan beberapa poin penting yang dapat menjadi bahan diskusi lanjutan. Harapannya hasil seminar dan diskusi ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengusaha, pemerintah Aceh serta stakeholders yang terkait termasuk dunia pendidikan.

Sebagai pengantar, perlu disampaikan beberapa poin penting perjalanan Aceh, yang menurut penulis menjadi momentum penting untuk menuju kearah Aceh yang lebih baik, adil, makmur dan bermartabat. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak di dunia. Perhatian ini muncul berkenaan dengan banyak hal, mulai persoalan konflik bersenjata dan dampaknya, bencana alam, serta potensi alam dan manusianya. Khusus mengenai potensi alam Aceh menjadi isu hangat yang oleh sebagian pihak diduga sebagai dasar kelahiran konflik bersenjata di tahun 1970-an.

Kemajuan industri, setelah penemuan cadangan gas bumi besar di Aceh Utara pada tahun 1971, ditandai dengan migrasi pekerja dari luar Aceh dalam jumlah yang cukup besar ke wilayah ini dan dirasakan oleh banyak penduduk lokal sebagai mengganggu dan eksploitatif. Pada era 1970-an, hanya sejumlah kecil proporsi pendapatan dari Zona Industri Lhokseumawe kembali kepada pemerintah Aceh. Disisi lain dari segi Manusia, tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, hegemonic, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat.

Gempa Bumi 8,9 Skala Richter dan disusul gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya, yang telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi dan ekologi Aceh, laporan Bappeda Aceh, 2009, *Sebelum Tsunami*: Jumlah Penduduk: 4.297.485 Jiwa, angkatan Kerja: 2.538.189 Jiwa, tingkat Pengangguran : 11,2% (dari Jumlah Penduduk), tingkat

¹ Bahan Diskusi dalam Seminar Nasional sehari Prospek Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh untuk Kesejahteraan & Kemakmuran Rakyat Sesuai amanah UUD 1945 dan UUPA, Banda Aceh, Kamis 04 April 2013

² Kamaruddin Hasan adalah adalah pensyarah di Fisip Unimal

Pertumbuhan Ekonomi: 3,5% per Tahun, struktur perekonomian didominasi oleh sektor pertanian dan jumlah penduduk miskin 1,7 juta jiwa atau 40,39 Persen. *PascaTsunami*: Jumlah Penduduk 4.076.760 Jiwa, pertumbuhan ekonomi turun 0,25 % pada tahun 2005, tingkat pengangguran 11,2 %, pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 % dan persentase penduduk miskin 28,8 %.³

Pasca musibah Gempa Bumi dan disusul gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, proses perdamaian Aceh ditandai dengan lahirnya MoU Helsinki tahun 2005 sebagai upaya mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik dan ekonomi paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik Indonesia. Laga senjata berubah menjadi adu argument, hutan belantara, berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi, diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan.⁴

MoU Helsinki 2005 dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga membuka peluang besar bagi Aceh dalam segala hal, terutama ekonomi Aceh. Peluang tersebut mesti sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar MoU dan UUPA.⁵ Prinsip-prinsip dasar perekonomian⁶ Aceh yang diatur dalam MoU dan UUPA.

³ Sumber laporkan Bappeda Aceh, 2009.

⁴ Kamaruddin Hasan, *Pilkada, Partai Lokal Dan Masa Depan Aceh, Harapan Berakhirnya Transisi* (Dalam: *Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU*, Pustaka Pelajar, 2008).

⁵ Pendapat ini, saya ramu dari hasil FGD dengan kawan-kawan KPA/PA dan KMPA wilayah Pidie, tanggal 5-6 Juni 2012.

⁶ Prinsip-prinsip dasar dalam MoU Helsinki, Prinsip yang pertama dan mungkin yang paling fundamental dari MoU (Pasal 1.1.2a) menyatakan 'Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.' Prinsip kedua MoU (Pasal 1.1.2b) menyatakan bahwa 'Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh,' prinsip ketiga (Pasal 1.1.2c) menyebutkan bahwa, 'Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh dan prinsip keempat MoU (Pasal 1.1.2d), menyatakan bahwa 'Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Prinsip-prinsip dasar Perekonomian di Aceh, mengacu pada UUPA Bab.XXII, antara lain disebutkan dalam **Pasal 154**, (1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. (2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh. (3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan,

SBY-JK saat itu tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam MoU. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY-JK melakukan lima babak komunikasi politik formal maupun informal dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koenigstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki.⁷ Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru⁸ dalam penyelesaian konflik Aceh, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi politik informal dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Mengingat tensi politik dan ekonomi di wilayah bekas konflik dan tsunami yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang bertarung. Untuk itu perlu dipahami, momentum-momentum yang dapat membawa masa depan Aceh kearah yang lebih baik, antaranya:⁹

Momentum damai Aceh, bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada

penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja. Dalam **pasal 155**, (1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. (2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya. (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.

⁷ Moch.Nuhasim, *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008), h. 108

⁸ Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001). Sementara untuk penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

⁹ Kamaruddin Hasan dan Nuhasim, Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008).

ancaman dan teror. *Momentum* selanjutnya Pilkada, bahwa cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika pilkada yang berlangsung 11 Desember 2006 dianggap paling demokratis telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh.

Momentum yang tak kalau penting adalah adalah Pilpres 9 Juli 2009 yang lalu, terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Boediono sebagai Wakil Presiden dan telah berhasil menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dan pilihan rakyat hampir 90% jadi kepada pasangan ini. Angka yang mengejutkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini menang mutlak di Aceh. *Momentum* Pemilukada 2012, yang sempat diwarnai berbagai konflik. Namun hal ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Pemilukada 2012 dapat berjalan dengan baik. Sehingga hal ini menjadi momentum tersendiri dalam proses percepatan pembangunan Aceh ke depan. Pasangan ini diharapkan dapat membawa Aceh lebih maju dan bermartabat. Pemimpin yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas. Rakyat Aceh, membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, dan hak-hak sosial, budaya dan politik, ruang public menjadi penting diperjuangkan.

Momentum Pemilu legeslatif dan Pilpres 2014, juga menjadi penting untuk dikawal agar dapat berjalan dengan baik. Sehingga hal ini menjadi momentum tersendiri dalam proses percepatan pembangunan Aceh ke depan.

Momentum lain, yang perlu mendapat perhatian khusus bahwa masyarakat Aceh mesti dilihat sebagai suatu identitas sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum sudah lama terbentuk sejak awal abad ke XVI (1520 M). Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Menurut J.C.Van Leur, melihat masyarakat Aceh yang egaliter termasuk masyarakat Ideal Maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal tipe masyarakat Agraris. Apalagi Aceh terkenal sebagai wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala upaya yang ingin mendominasi - apalagi "menjajah". Kahin 1990, menyebutkan Aceh termasuk sensitif terhadap orang-orang luar yang berkeinginan untuk menguasai Aceh. Orientasi ke-Aceh-an ini terkait dengan identitas Aceh, komitmen kepada Islam yang kuat, bahasa dan adat istiadat serta harga diri yang merupakan unsur-unsur yang melandasi identitas ke-Aceh-an.¹⁰ Masyarakat Aceh berjuang demi identitasnya, menentang ketidakadilan, merasa dipinggirkan dan dizalimi.¹¹

¹⁰ Anthony Reid, Ed., *Verendah of Violence The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 12. Dan Hasil FGD dengan pihak KPA/PA dan KMPA Pidie tgl 6-7 Juni 2012.

¹¹ Beberapa buku untuk menggambarkan hal ini masih layak dibaca diantaranya ditulis oleh Anthoni Reid, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh (Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abat ke-19*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Harley (editor), 2008, *Mukim Dari Masa ke Masa*, JKMA, Banda Aceh. Isa Sulaiman, 2006, *Mosaik Konflik di Aceh*, AcehKita dan ACSTF, Jakarta & *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-kuasar, Jakarta. M Nuer El Ibrahimy, 1982, *Teungku Muhammad*

POTENSI ALAM VS POTENSI MANSUSIA

Potensi Sumber Daya Alam yang terdapat di negeri ini jika dikelola secara optimal tentu akan dapat memberikan kontribusi besar dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. UUD 1945 juga mengamanahkan bahwa pemanfaatan SDA adalah sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, seiring permintaan kebutuhan hidup juga terus meningkat. Akibatnya eksploitasi SDA tidak mungkin dihindari. Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan ketersediaannya, maka diperlukan SDM sebagai pengelolaan yang baik dan terencana sehingga keduanya dapat saling menunjang demi tercapainya pembangunan yang merata.

Potensi sumber Alam yang terdapat di Aceh, tidak dapat dipungkiri bahwa Aceh kaya akan SDA. Badan Investasi dan Promosi Aceh mencatat bahwa Aceh memiliki SDA yang sangat komplit, di antaranya adalah sumber daya pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan pertambangan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh juga melaporkan bahwa komoditi ekspor terbesar adalah bersumber dari sektor pertambangan dengan volume mencapai 2.3 juta ton atau senilai USD 1.3 miliar (ekspor menurut komoditi, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa potensi SDA dari sektor ini sangatlah besar. Namun perlu diingat, bahwa pertambangan termasuk ke dalam SDA yang tidak dapat diperbarui sehingga apabila terus menerus dieksploitasi maka jumlahnya akan semakin berkurang. Sebagai contoh, PT Arun NGL yang beroperasi sejak 1974, saat ini cadangan gas alamnya telah menipis dan diperkirakan akan berhenti berproduksi pada tahun 2014 (The Jakarta Post, 11/8/2010).

Potensi Aceh sangat menjanjikan selain Migas ada juga kandungan uranium dan emas yang belum tereksplorasi oleh industrialisasi modern. Hal ini, dikarenakan potensi sumber daya manusia masih sangat minim atau belum ada seseorang yang profesional. Maknanya keahlian dibidang industrialisasi masih kurang kompeten selanjutnya kekayaan alam juga tidak dapat di berdayakan oleh pemerintah Aceh sendiri. Iklim investasi juga sangat menjanjikan mengingat banyak minat dari investor asing yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini.

Sumber alam Aceh awalnya muncul dengan adanya potensi Migas yang sudah dilakukan eksplorasi sejak tahun 1960-an namun ada potensi lain yang tersembunyi didalam pegunungan Aceh. Kandungan sumber daya alam seperti itu menjadikan lahan yang subur bagi investasi aceh dimasa depan apa lagi potensinya sangat menjanjikan. Momentum yang baik ini tidak dikelola atau diberdayakan oleh pemerintah Aceh karena berbagai kepentingan yang bersifat politis. Tantangan tersebut menjadi sebuah batu sandungan dalam menciptakan nuansa iklim investasi yang baik bagi Aceh. Sebenarnya iklim investasi sudah hidup dan tinggal menunggu perkembangan secara lebih maksimal untuk menuju Aceh yang maju. Potensi alam yang kaya menjadikan daerah ini sangat sinerji untuk dilakukan produksi dalam bentuk industrialisasi yang efektif serta efisien. Selain potensi

Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, Gunung Agung, Jakarta. Otto Syamsuddin, 2001, Dari Maaf Ke Panik Aceh (Sebuah Sketsa Sosiologi Politik), LSPP, Jakarta. Taufan Damanik, 2010, Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalisme, FES dan AFI, Jakarta.

pertambangan Aceh juga memiliki kadar pertanian yang bagus serta dapat menjadi lahan pertanian yang subur bagi masyarakat.

Ketika SDA Aceh sudah tidak dapat menunjang pertumbuhan dan pembangunan masyarakat Aceh maka diperlukan langkah yang cepat dan tepat guna menangani hal tersebut salah satunya dengan peningkatan kualitas SDM Aceh, sehingga dapat mendukung bagi kemajuan masyarakat Aceh.

Perkembangan Sumber Daya Manusia yang handal menjadikan sebuah daerah atau wilayah akan berkembang dengan pesat. Potensi sumber daya lokal harus dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya potensi tersebut harus disesuaikan dengan sumberdaya yang ada di Perguruan Tinggi karena hal ini dapat menyerap potensi tenaga kerja lokal. Budaya malas juga mesti di hilangkan dalam masyarakat Aceh karena dibalik itu semua tersimpan sebuah kemajuan jika mapu distimulasikan. Memang persoalan ini tidak mudah dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia karena sangat disayangkan bila potensi alam Aceh di eksplorasi oleh orang lain untuk kepentingan Investor dan masyarakat Aceh hanya jadi penonton.

Pengembangan sumber daya Lokal harus dilakukan oleh Pemerintahan Baru Aceh dengan mengandalkan potensi tenaga professional yang handal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk membangun sarana industrialisasi yang menguntungkan masyarakat Aceh. Peningkatan sumber daya Manusia ditingkat lokal disesuaikan dengan keahlian dibidangnya dengan progress pengalaman dan pendidikan. Hilangkan budaya Paternalistik sehingga orang yang benar-benar mampu dapat berbuat untuk kemajuan daerah ini. Berkerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan memberikan pelatihan bagi sumber daya lokal. Pemerintah juga berupaya mengundang Investor yang berpotensi menguntungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah iklim investasi baik maka berdayakan tenaga lokal selama beberapa tahun. Hal ini, diharapkan agar tenaga lokal dapat berkembang dan bisa mandiri sehingga Aceh tidak terlalu tergantung pada investor. Jika semua hal tersebut dapat diwujudkan, mungkin Aceh menjadi lebih baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya terhadap potensi sumberdaya alam. Semoga pemerintahan Aceh sekarang mampu mewujudkannya seperti janji-janji politik yang diikrarkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Seperti tertuang dalam visi misi Pemerintah Aceh; antara lain: Kesejahteraan masyarakat Aceh merupakan harapan yang harus dicapai sebagai amanah dari indatu kita. Sebagai wilayah modal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh letak geografis yang sangat strategis, terletak di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Tidak hanya itu, Aceh juga memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan terampil.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA idealnya menjadi

pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan pada proses keberlanjutan reintegrasi dan konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinki dan implementasi UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik.

Meskipun faktor kerentanan terhadap konflik dapat diminimalkan pada tahap pembangunan pertama, namun masih banyak hal yang telah dituangkan dalam UUPA belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya terwujud koheisi (rekatan) ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat Aceh. Misalnya, masih adanya tumpang tindih pembangunan antar sektor dan antar daerah. Sementara itu, kesejahteraan rakyat masih belum merata meskipun sumber daya pembangunan telah dihabiskan secara masif, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil Migas. Belum lagi bila dijumlahkan dengan besaran dana perbantuan dan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat maupun bantuan Lembaga Internasional yang bersifat *non-budgeter*.

Selain itu, masalah yang masih menjadi kendala bagi Provinsi Aceh, antara lain: *Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh*. Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 19,48 persen, masih lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,36 persen. Disamping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,483 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,936 (BPS, September 2011). Sebaran penduduk miskin Aceh, lebih dominan berada di pedesaan, (80,14%), sedangkan dipertanian hanya 19,86%. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 7,43 persen, sementara angka pengangguran terbuka Nasional hanya sebesar 6,8 persen. Jika dilihat dari sisi gender, keberadaan pengangguran terbuka perempuan tahun 2011 mencapai 8,50 persen lebih tinggi 1,70 persen dibandingkan pengangguran terbuka laki-laki sebesar 6,80 persen.

Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah. Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan Aceh. Pihak swasta masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah, atau pengusaha daerah yang berada di luar daerah, ataupun kemampuan pengusaha daerah untuk menarik pengusaha luar daerah bahkan dari luar negeri untuk berinvestasi. Sinkronisasi investasi pembangunan menjadi imperatif agar terjadi sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program

pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya, dan keunikan lokal.

Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutan. Sistem pengelolaan sumberdaya alam kurang memperhatikan kondisi alam, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan kelangsungan pembangunan daerah,. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan kelautan yang berdampak pada kerusakan ekosistem, bencana alam, dan tatanan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik, selain dapat membuka lapangan kerja baru juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian masih sangat rendah jika dilihat dari produktivitas tenaga kerja, walaupun telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 48,22%. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya kepemilikan lahan per kepala keluarga. Rata-rata kepemilikan lahan perkepala keluarga hanya sekitar 0,25 – 0,6 ha/kk dengan IndeksPertanaman (IP) sekitar 1,28 pertahun, sedangkan produktivitas padi baru mencapai 4,6 ton/ha. Disamping sektor pertanian, sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam juga mengalami persoalan yang sama sehingga belum mampu memperkuat nilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya.

Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah. Lemahnya pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi sejauh ini, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami *instabilitas*. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 5,02 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 6,5 persen. Disamping itu, jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir (2007-2011), pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa pondasi struktur ekonomi Aceh masih lemah dan labil. Perubahan harga jual komoditi migas dan produk pertanian di pasaran dunia sangat mempengaruhi nilai sumbangan produk yang paling dominan dalam struktur ekonomi Aceh. Hal ini disebabkan karena ekspor kedua sektor ini masih dalam bentuk bahan mentah (*row material*). Sehingga, nilai tambah yang diperoleh dari hasil ekspor komoditas ini menjadi sangat kecil.

Catatan penutup

Sebagai akhir dari paparan diatas, saya kira, dalam menyeimbangkan antara potensi Sumber Daya Alam dan Potensi Sumber Daya Manusia di Aceh. Membutuhkan keseriusan dan keterlibatan semua pihak. Mestinya sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas, dunia pendidikan mesti mendapat perhatian serius dan khusus, selain Sumber Daya Alam (SDA). Pendidikan termasuk didalamnya Perguruan Tinggi menjadi pilar utama dalam membangun Sumberdaya Manusia. Kita pahami bahwa kalangan akademisi, Dosen, mahasiswa dan Pemuda merupakan pilar utama dalam membangun bangsa, dengan semangat mereka pula bangsa ini dilahirkan. Mereka, merupakan penggerak utama perubahan, sebagai pembaharu dalam menggerakkan perubahan di era kemerdekaan. Watak progresif dan revolusioner juga terbukti memberi dorongan positif dalam

menggerakkan perlawanan terhadap kaum kolonial pada masa penjajahan. Peran mereka pada dasarnya diwujudkan dengan berbagai cara, baik sebagai kekuatan *moral force* dalam negosiasi keberlangsungan kekuatan yang tidak sepihak terhadap kepentingan bangsa maupun sebagai motivator dalam menghidupkan ideology dan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan sosial dan hak-hak dasar warga Negara, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, mahasiswa dan pemuda sebagai pembentuk karakter bangsa (*Nation and character building*) telah berhasil memandang bahwa lautan bukanlah sebagai pemisah namun justru sebagai pemersatu bangsa.

=====